

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN  
LORONG WISATA DI KECAMATAN UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Silvi Fadilla Alviani

NPP. 32.0913

*Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: [32.0913@ipdn.ac.id](mailto:32.0913@ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Drs. Jojo Juhaeni, MM.

**ABSTRACT**

**Problem / Background (GAP):** *Community participation in the development and management of tourism alleys in Ujung Pandang District, Makassar City, has not been optimally implemented in terms of community involvement, both in planning and management. As a result, the economic and social potential of the tourism alleys has not been fully utilized. Community participation is uneven because some residents remain passive and tend to rely more on assistance from the government.***Purpose:** *The purpose of this study is to analyze community participation in the development and management of tourism alleys in Ujung Pandang District, Makassar City, and to describe the efforts made by the Ujung Pandang District to increase community participation in the development and management of tourism alleys in the area.* **Method:** *This study uses a qualitative method with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation studies. The analysis applies the Participation Theory from Cohen, J, and Uphoff (1979), which includes participation in attending meetings, discussions, contributing ideas, and responses or objections to the proposed programs.* **Results:** *Community participation in the implementation of the Lorong Wisata program in Ujung Pandang District has been actively carried out, supported by guidance provided to the community and the involvement of youth leaders who coordinate efforts to improve the quality of the Lorong Wisata. With this, it is expected that the Makassar City government can provide support such as funding assistance and aid in procuring tools or public facilities related to the Lorong Wisata development concept, along with regular evaluations to monitor community engagement* **Conclusion:** *The existence of obstacles to community participation in the development and management of tourism alleys in Ujung Pandang District has prompted the district to take action by providing guidance to the community. In carrying out this guidance, the local government and youth leaders coordinate by appointing a Lorong Council in each tourism alley, consisting of three elements: seniority (community leaders or elders), gender representation (men and women), and millennials (as the majority of the population are millennials). In addition, the Makassar City Government is expected to provide*

*support such as funding and the provision of tools or public facilities related to the development and management of tourism alleys.*

**Keywords:** *community participation, tourist alley*

## ABSTRAK

**Permasalahan / Latar Belakang (GAP):** Partisipasi masyarakat pada pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dalam pelaksanaan programnya belum terlaksana secara optimal, baik dalam perencanaan maupun pengelolaan, dikarenakan partisipasi masyarakat yang belum merata berdasar pada jumlah data lorong wisata unggul dan tertinggal, karena sebagian warga masih bersikap pasif dan lebih mengandalkan bantuan dari pemerintah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pengelolaan Lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Partisipasi dari Cohen, J, and Uphoff (1979) yaitu Partisipasi kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. **Hasil/Temuan:** Masyarakat sudah ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata baik dalam tahap perencanaan, pengelolaan evaluasi maupun pemanfaatan hasil. Kehadiran warga dalam rapat relatif tinggi, namun sumbangan pemikiran dan keterlibatan aktif dalam musyawarah atau diskusi masih terbatas pada kelompok tertentu. Tanggapan dan penolakan masyarakat terhadap program umumnya positif, meskipun terdapat sebagian kecil warga yang menolak atau kurang mendukung program karena merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas partisipasi masyarakat agar pengelolaan lorong wisata dapat berjalan lebih efektif dan inklusif. Manfaat partisipasi masyarakat yang dirasakan dari segi penghasilan menjadi meningkat bukan itu saja tetapi lorong wisata menjadi lebih terawat. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang sudah terlaksana dengan aktif, dengan adanya pembinaan kepada masyarakat, dan melibatkan masyarakat dari tokoh pemuda, dewan lorong dan tokoh masyarakat yang berkordinasi untuk meningkatkan kualitas lorong wisata. Dengan hal tersebut diharapkan bahwa pemerintah Kota Makassar dapat memberikan dukungan seperti bantuan dana dan bantuan pengadaan alat atau fasilitas umum yang berhubungan dengan konsep pembangunan lorong wisata dan adanya evaluasi secara berkala untuk memonitor keaktifan masyarakat.

**Kata Kunci :** partisipasi masyarakat, *lorong wisata*.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait permukiman kumuh, kepadatan penduduk, dan permasalahan sampah. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2023), jumlah penduduk Kecamatan Ujung Pandang tercatat dengan rincian berdasarkan kelurahan dan jenis kelamin, dengan total penduduk tersebar di 10 kelurahan. Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang bervariasi di tiap kelurahan, dengan luas wilayah total 2,63 km<sup>2</sup>. Data rinci menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Ujung Pandang tergolong banyak sehingga permasalahan sampah juga terjadi pada kecamatan ini. Untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Makassar meluncurkan program “Makassar Tidak Rantasa” dan “Lorong Wisata”. Program lorong wisata bertujuan mengubah lorong-lorong sempit yang sebelumnya kumuh menjadi kawasan yang bersih, hijau, produktif, dan menarik sebagai destinasi wisata berbasis komunitas.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Menurut Mantiri, J. (2023) dalam Buku Ajar Manajemen Pembangunan Daerah "pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi." Menurut Jeddawi (2017) "Diskresi perangkat hukum dalam pembangunan harus tetap melibatkan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga, sehingga pembangunan berjalan efektif dan partisipatif." Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar dan mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggungjawab, mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah. Menurut Sumanjoyo (2022) dalam Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik "Partisipasi adalah kesediaan masyarakat untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa mengorbankan kepentingan pribadi." seperti diketahui kesuksesan sebuah program harus didukung oleh dukungan finansial yang bagus dan stabil dan juga dukungan sumber daya lainnya.

Program lorong wisata merupakan sebuah program dengan kebutuhan biaya yang besar. Namun, biaya yang sebelumnya dianggap besar berhasil ditekan dengan modifikasi program terutama dalam hal partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai kunci utama keberhasilan program. Lorong wisata menjadi salah satu fokus pemanfaatan terhadap program tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2023), program Lorong Wisata di Kota Makassar merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis masyarakat. Program ini melibatkan partisipasi aktif warga lorong dalam pengelolaan dan pengembangan potensi lokal, sehingga mampu menciptakan destinasi wisata yang unik dan berkelanjutan di lingkungan perkotaan dengan jumlah Lorong wisata yang tersedia sebanyak 2000 lorong.

Tujuan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang adalah untuk memperkuat ekonomi masyarakat setempat dengan membantu pengembangan UMKM di lorong wisata, meningkatkan pendapatan warga, serta memperbaiki dan merawat lingkungan fisik lorong wisata agar menjadi lebih bersih, hijau, dan produktif. Selain itu, partisipasi masyarakat juga bertujuan meningkatkan wawasan dan kesadaran warga terhadap pentingnya pengelolaan lorong wisata secara berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil, program lorong wisata dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang nyata bagi komunitas lokal. Pemerintah juga berupaya meningkatkan partisipasi ini dengan membentuk Dewan Lorong yang melibatkan tokoh masyarakat, perwakilan gender, dan kaum milenial serta memberikan dukungan berupa dana dan fasilitas pendukung. Namun, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang masih belum optimal, dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengetahuan, dan rendahnya keterampilan. Hal ini mempengaruhi dalam pelaksanaan program Lorong wisata karena partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif program, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Lorong Wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dimana daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memperkuat ekonomi masyarakat setempat dengan membantu UMKM di lorong wisata dan tentunya diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengembangannya.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar 2021-2026, lorong wisata dipandang sebagai sektor potensial yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata baru, tetapi juga sebagai upaya strategis Pemerintah Kota Makassar untuk memulihkan perekonomian pasca-pandemi. Pada Kecamatan Ujung Pandang terdapat 56 lorong wisata, yang terdiri dari 55 lorong unggul dan 2 lorong tertinggal, sehingga Kecamatan Ujung Pandang tidak dapat mencapai program keberhasilan lorong wisata karena masih terdapat lorong tertinggal. Program ini didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Lorong wisata, meskipun masyarakat ikut hadir dalam kehadiran dalam rapat, sumbangan pemikiran, musyawarah/diskusi, dan tanggapan terhadap program lorong wisata, keterlibatan mereka masih terbatas oleh beberapa kendala utama, seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta rendahnya keterampilan masyarakat setempat. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa program lorong wisata hanya bersifat formalitas sehingga banyak warga yang belum berpartisipasi secara optimal.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah melalui pembinaan, koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuda, serta dukungan berupa bantuan dana dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan dan efektivitas pengembangan lorong wisata sangat bergantung pada bagaimana mengatasi hambatan tersebut dan memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang, pengembangan

lorong wisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM dan optimalisasi potensi sumber daya alam serta manusia. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dan upaya yang dilakukan Kecamatan Ujung Pandang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pertama, Penelitian Maulida Nur Perdani (2024) dalam penelitiannya berjudul "Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani pada Program *Lorong* Wisata di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kelompok wanita tani aktif berpartisipasi dalam program lorong wisata. Partisipasi ini mencakup keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan lorong wisata, yang berdampak positif pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan anggota kelompok tersebut.

Kedua, penelitian Muh. Nurfauzi Iksan (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Program *Lorong* Wisata di Kota Makassar" dalam penelitian ini ditemukan bahwa program Program lorong wisata di Makassar dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif seperti lingkungan yang lebih bersih dan produktif. Namun, rendahnya tingkat pendidikan sebagian warga mempengaruhi partisipasi mereka, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih efektif. Pemerintah telah melakukan perbaikan, terutama mengatasi ruang sempit dan kondisi kumuh. Meski melibatkan berbagai elemen masyarakat, masih ada kendala seperti kurangnya aturan resmi, batas waktu pelaksanaan yang tidak jelas, dan partisipasi yang belum maksimal, sehingga pengelolaan program perlu ditingkatkan lewat sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan lebih baik.

Ketiga, penelitian oleh Tasya Amelia (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Collaborative Governance Dalam Program *Lorong* Wisata Di Kota Makassar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam program lorong wisata di Makassar berjalan cukup baik dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, beberapa aspek seperti desain kelembagaan dan pengarsipan bukti kerja sama masih kurang optimal, serta proses kolaborasi memerlukan peningkatan komitmen bersama. Selain itu, masukan dari masyarakat lorong perlu lebih diperhatikan untuk keberlanjutan program. Secara keseluruhan, kolaborasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi, budaya, dan lingkungan yang terintegrasi.

Keempat, penelitian oleh Pratiwi Wulandari (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Kebijakan Sosial *Lorong* Wisata Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar". Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Program lorong wisata merupakan strategi Pemerintah Kota Makassar untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan memberdayakan masyarakat dan mengembangkan UMKM di lorong-lorong kota. Program ini telah menjangkau ribuan lorong dan berhasil meningkatkan estetika serta

perputaran ekonomi lokal. Namun, keberadaan lorong wisata belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang masih menghadapi masalah sosial-ekonomi seperti pengangguran dan keterbatasan akses fasilitas publik. Kebijakan sosial terkait pengembangan lorong wisata dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan kebijakan yang tepat sasaran agar pengembangan lorong wisata dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Makassar

Kelima, penelitian oleh Mohammad Mukyadi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat *Lorong* di Kota Makassar". Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lorong di Kota Makassar merupakan wujud kemandirian lokal yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas diri, pelatihan keterampilan, pembentukan badan usaha lorong, dan kemitraan dengan UKM. Masyarakat juga terlibat dalam pemeliharaan kebersihan, keamanan, kegiatan keagamaan, dan usaha ekonomi bersama. Namun, masih ada kendala seperti konflik antar lorong dan keterbatasan kemampuan dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sehingga kegiatan cenderung bersifat seremonial tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian lokal yang sesungguhnya. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dimana penulis menfokuskan secara detail mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Penelitian Maulida Nur Perdani (2024) yang berjudul Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani pada Program Lorong Wisata di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, secara khusus meneliti partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Bara-Baraya, yang merupakan bagian dari Kecamatan Makassar. Penelitian ini lebih terfokus pada peran kelompok wanita tani dalam program lorong wisata, sehingga lebih menyoroti dinamika dan kontribusi kelompok perempuan dalam konteks pertanian dan pemberdayaan lokal di wilayah yang lebih spesifik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu partisipasi masyarakat umum dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di seluruh Kecamatan Ujung Pandang. Fokusnya mencakup berbagai indikator partisipasi seperti kehadiran dalam rapat, sumbangan pemikiran, musyawarah, dan tanggapan terhadap program, serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat tanpa membatasi pada satu kelompok sosial tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nurfauzi Iksan (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program Lorong Wisata di Kota Makassar, lebih fokus pada efektivitas program lorong wisata secara keseluruhan di Kota Makassar. Penelitian ini mengkaji sejauh mana program lorong wisata berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk aspek

perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Fokusnya lebih luas pada evaluasi program dan dampak yang dihasilkan, bukan hanya pada partisipasi masyarakat secara spesifik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai tahap pembangunan dan pengelolaan lorong wisata, termasuk kehadiran dalam rapat, sumbangan pemikiran, musyawarah, serta tanggapan terhadap program. Fokus penelitian Anda adalah memahami tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang.

Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Amelia (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Program Lorong Wisata Di Kota Makassar, mengkaji model *Collaborative Governance* dalam program lorong wisata di Kota Makassar secara lebih luas. Penelitian ini menyoroti bagaimana kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, pelaku usaha (UMKM), akademisi, dan media—dijalankan untuk meningkatkan inovasi layanan publik melalui pengelolaan lorong wisata. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus pada proses dialog, pembentukan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman bersama antar pemangku kepentingan sebagai kunci keberhasilan program. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada partisipasi masyarakat secara langsung, seperti kehadiran dalam rapat, sumbangan pemikiran, musyawarah, dan tanggapan terhadap program dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang. Fokusnya adalah pada tingkat dan bentuk keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengelolaan lorong wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Wulandari (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Sosial Lorong Wisata Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar. berfokus pada analisis kebijakan sosial lorong wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Makassar secara keseluruhan. Penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan pemerintah dalam program lorong wisata dapat berdampak pada peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin yang tinggal di lorong, serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan direspon oleh masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis Fokusnya adalah pada tingkat dan bentuk keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengelolaan lorong wisata. partisipasi masyarakat sebagai aspek sosial dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Mukyadi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lorong di Kota Makassar, fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat lorong sebagai strategi untuk mewujudkan kemandirian lokal di Kota Makassar. Penelitian ini menyoroti program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan motivasi masyarakat lorong melalui pelatihan keterampilan, sosialisasi pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan kapasitas diri agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek pemberdayaan dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga di lorong-lorong kota. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata,. Dan

menggunakan indikator partisipasi sosial, dan bertujuan memahami partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan wisata.

### 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dan untuk mendeskripsikan mengenai upaya yang dilakukan Kecamatan Ujung Pandang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana berfokus pada pengamatan mendalam dan menyeluruh. Menurut Creswell dalam Murdiyanto (2020), “penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini merupakan strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah”. Penelitian kualitatif pada dasarnya memanfaatkan data berupa hasil pikiran, sudut pandang, pendapat orang yang diteliti baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Sugiyono (2021) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D “penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (bukan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.” Dalam penelitian ini penulis memilih metode kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, seperti motivasi, sikap, dan dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks lokal yang spesifik dan pendekatan ini bersifat fleksibel, sehingga peneliti dapat menyesuaikan fokus dan pertanyaan penelitian berdasarkan kondisi lapangan dan respons partisipan, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan kontekstual.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 15. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang terdiri dari Plt. Camat Kecamatan Ujung Pandang berjumlah 1 (Satu) Orang, Lurah di Kecamatan Ujung Pandang berjumlah 2 (dua) orang, Dewan Lorong berjumlah 1 (Satu) orang dan Masyarakat berjumlah 3 (Tiga) orang. Dalam menganalisis hasil penelitian penulis menggunakan Teori Partisipasi Cohen and Uphoff (1979) yang memiliki 4 (Empat) aspek yaitu kehadiran dalam rapat, sumbangan pemikiran, musyawarah/diskusi, dan tanggapan terhadap program.

Penulis memilih informan Plt. Camat Kecamatan Ujung Pandang sebagai informan kunci dikarenakan beliau merupakan orang yang memegang tupoksi dan bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan program di Kecamatan Ujung Pandang termasuk dengan program *lorong* wisata penulis juga menambahkan masyarakat yang tinggal di wilayah *lorong* wisata sebagai informan kunci guna menjadi pemberi data dari pihak Masyarakat dengan jumlah yang

tidak dibatasi dengan metode accidental sampling sehingga penelitian akan diakhiri apabila sudah mendapatkan jawaban yang jenuh atau berulang mengenai partisipasi masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang pada program *lorong* wisata. jumlah tersebut merupakan informan kunci, kemudian dari masing-masing informan kunci tersebut akan diperoleh informan tambahan sehingga terkait jumlah informan akan fleksibel yang terpenting adalah wawancara mencapai titik jenuh data sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang relevan dan mendalam.

Penulis juga memilih informan utama dari Lurah Kecamatan Ujung Pandang dikarenakan lokasi *lorong* wisata tersebar di berbagai kelurahan sehingga diperlukan data yang akurat dari penanggung jawab setiap kelurahan yaitu Lurah dari kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang. Penulis juga menambahkan informan tambahan dari dewan *lorong* sebagai penanggung jawab langsung dari masyarakat di *lorong* yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola program *lorong* wisata di lokasi yang ada.

Penulis menetapkan beberapa informan tersebut untuk dimintai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Meskipun demikian, tetap ada kemungkinan bahwa jumlah informan yang diidentifikasi peneliti dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi penelitian di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan Penelitian dilaksanakan berdasarkan Kalender Akademik IPDN Tahun Akademik 2024/2025 terhitung sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Juni 2025.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada hasil penelitian dan pembahasan ini penulis akan menguraikan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan dalam Pengelolaan Lorong Wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dan upaya yang dilakukan Kecamatan Ujung Pandang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Selanjutnya data yang di peroleh tersebut di analisis dengan menggunakan Teori Partisipasi Cohen and Uphoff (1979) sebagaimana penulis uraikan di bawah ini.

#### **3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Lorong Wisata di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar**

Menurut Efendi (2022), partisipasi dalam sektor publik dapat dipahami sebagai kesediaan individu untuk membantu keberhasilan program sesuai dengan kemampuan tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Lorong wisata dari Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan lorong wisata, lorong wisata didefinisikan sebagai lorong yang dapat menjadi daerah kunjungan wisata yang memiliki infrastruktur yang baik, lingkungan asri, indah, bersih, hijau, dan menarik serta terdapat perputaran ekonomi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian warga tersebut. Pembentukan Lorong Wisata dilakukan berdasarkan usulan dari kelurahan melalui koordinasi bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, dan RW

setempat, kemudian diverifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama tim ahli perangkat daerah dan/atau tim ahli Walikota Makassar sebelum ditetapkan. Pelaksanaan program ini melibatkan perangkat daerah, BUMD, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi kemasyarakatan. Program Lorong Wisata bertujuan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam perputaran ekonomi serta meningkatkan kebersihan, keindahan, dan keamanan lorong wisata tersebut

Partisipasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan memastikan bahwa program pemerintah menjadi bermakna serta konstruktif bagi komunitas lokal. Dalam menganalisis hasil penelitian penulis menggunakan Teori Partisipasi Cohen and Uphoff (1979) yang memiliki 4 (Empat) konsep yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam evaluasi, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

### **3.1.1 Kehadiran dalam rapat**

Kehadiran dalam rapat dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa masyarakat aktif hadir dan berperan sebagai subjek dalam kegiatan perencanaan. Kehadiran mereka dalam sosialisasi, musyawarah, dan rapat-rapat pengembangan lorong wisata sangat terlihat, sekaligus mereka aktif memberikan kritik, saran, dan masukan demi kemajuan lorong wisata. Partisipasi ini juga mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam memonitor pelaksanaan program di tingkat kelurahan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan dana dan rendahnya keterampilan yang mempengaruhi optimalisasi partisipasi. Pemerintah dan tokoh masyarakat berupaya meningkatkan partisipasi melalui pembinaan dan pembentukan Dewan Lorong yang melibatkan unsur senioritas, perwakilan gender, dan kaum milenial untuk mendorong kehadiran dan keterlibatan masyarakat secara lebih maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa rutin hadir dalam musyawarah dan keterlibatan aktif adalah topik yang paling sering muncul dalam jawaban informan. Yaitu rutin dalam musyawarah menunjukkan kehadiran yang rutin dalam musyawarah terkait program *lorong* wisata, yang merupakan bagian penting dari pengembangan *lorong* wisata. Masyarakat tidak hanya hadir, tetapi juga aktif berpartisipasi dengan memberikan masukan, kritik, dan saran. Dalam setiap musyawarah, mereka berkesempatan untuk menyampaikan ide-ide kreatif tentang pengembangan *lorong* wisata, termasuk aspek promosi, penataan lingkungan, dan penyediaan fasilitas yang mendukung. Dengan rutin hadir dalam musyawarah, masyarakat merasa memiliki program *Lorong* Wisata. Rasa kepemilikan ini mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menjaga kebersihan serta keindahan *lorong* wisata. Dan yang kedua keterlibatan aktif menunjukkan keterlibatan aktif dalam musyawarah mengenai program *lorong* wisata, yang merupakan bagian penting dari pengembangan komunitas dan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam proses perencanaan *lorong* wisata. Mereka terlibat dalam musyawarah yang diadakan untuk merumuskan ide-ide dan strategi pengembangan *lorong* wisata. Kehadiran mereka dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi menunjukkan komitmen untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terhadap program ini. Selama musyawarah, masyarakat aktif memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif. Ini mencakup pendapat tentang pengelolaan *lorong*, jenis atraksi yang ingin dikembangkan, serta cara mempromosikan *lorong* wisata agar lebih dikenal oleh masyarakat

luas. Dengan adanya umpan balik ini, program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa pentingnya kehadiran masyarakat dalam setiap rapat yang diadakan terkait program *lorong* wisata, partisipasi aktif dari masyarakat merupakan indikator kunci dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Namun, terkait dengan operasionalnya masyarakat masih memandang kehadiran dalam rapat hanya sekedar formalitas, maka dari itu Kecamatan Ujung Pandang sangat berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengembangan *lorong* wisata dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program ini hal tersebut guna menjadikan partisipasi mereka sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan bersama.

### **3.1.2 Sumbangan Pemikiran**

Sumbangan pemikiran dalam partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan *lorong* wisata di Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa masyarakat aktif memberikan kritik, saran, dan masukan selama proses pengembangan *lorong* wisata berlangsung. Menurut Hafrida et al. (2023) "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui gotong royong, musyawarah, serta kontribusi tenaga dan pemikiran. Partisipasi ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan." Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada kehadiran dalam rapat dan musyawarah, tetapi juga pada keterlibatan dalam memberikan ide-ide konstruktif yang mendukung kemajuan dan keberlanjutan *lorong* wisata. Sumbangan pemikiran tersebut turut membantu dalam perencanaan yang berkelanjutan serta evaluasi program, sehingga masyarakat berperan sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Namun, partisipasi ini masih terkendala oleh keterbatasan dana dan rendahnya keterampilan masyarakat, sehingga pemerintah melakukan pembinaan dan membentuk Dewan *Lorong* yang melibatkan tokoh masyarakat, perwakilan gender, dan kaum milenial untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengelolaan *lorong* wisata. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa sumbangan pemikiran dari masyarakat merupakan indikator penting dalam menentukan partisipasi mereka dalam program *lorong* wisata, dan masyarakat Kecamatan Ujung Pandang cukup aktif dalam pemberian ide atau masukan untuk pelaksanaan program. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik dalam rapat, tetapi juga pada kontribusi ide dan gagasan yang mereka miliki. Setiap warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam pengembangan *lorong* wisata yang dapat meningkatkan kualitas hidup di kelurahan mereka.

Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan guna meningkatkan kualitas dan potensi *lorong* wisata di Kecamatan Ujung Pandang yaitu adanya perbaikan dan budidaya kebun *lorong* wisata, adanya kegiatan gotong royong untuk membersihkan lokasi kebun. Selain itu, masyarakat juga mengajukan penambahan bibit tanaman baru sebagai bahan budidaya. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun, tetapi juga untuk memperkuat rasa kebersamaan diantara warga.

Upaya mengembangkan sektor kuliner di *lorong* wisata, direncanakan untuk membuat lokasi khusus kuliner yang akan berada di satu titik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung dalam menemukan berbagai pilihan kuliner lokal yang ditawarkan oleh masyarakat setempat. Sehingga masyarakat dapat fokus pada peningkatan UMKM di *lorong* wisata. Masyarakat berupaya memperkenalkan potensi UMKM berupa es krim olahan dari tanaman pakcoy yang menjadi ciri khas *lorong* wisata di Kecamatan Ujung Pandang, dengan mengenalkan produk ini secara lebih luas, diharapkan dapat menarik perhatian pengunjung dan meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di daerah tersebut.

### 3.1.3 Musyawarah/Diskusi

Musyawarah/diskusi dalam partisipasi masyarakat pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan musyawarah dan diskusi terkait pengembangan lorong wisata. Kehadiran dan keaktifan mereka dalam musyawarah memungkinkan mereka memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif untuk kemajuan lorong wisata. Musyawarah ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersama-sama merencanakan pengembangan yang berkelanjutan serta memonitor pelaksanaan program. Meskipun demikian, partisipasi dalam musyawarah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan dana dan rendahnya keterampilan, sehingga pemerintah melakukan pembinaan dan membentuk Dewan Lorong yang melibatkan tokoh masyarakat, perwakilan gender, dan kaum milenial guna meningkatkan efektivitas musyawarah dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Cahyani & Sukmana (2023) "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam partisipasinya meliputi peran aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Keterlibatan ini menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat." Menurut Sukrianto & Mahendra (2023) "Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan program, yang menjadi faktor utama keberhasilan program tersebut." Maka dari itu, kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah sangatlah penting guna menjalankan sistem penyusunan program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan masyarakat sangat menghargai peran diskusi dan musyawarah sebagai cara Kecamatan Ujung Pandang untuk meningkat keterlibatan masyarakat dalam program *lorong* wisata. Namun, dalam operasionalnya masih terdapat masyarakat yang ragu dan tidak berani dalam menyampaikan pendapat dan ide dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan hal ini karena adanya stigma dalam masyarakat bahwa suara dari masyarakat hanya untuk formalitas semata dan tidak akan didengar, sehingga Kecamatan Ujung Pandang berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi mengenai sistematis pelaksanaan musyawarah terhadap masyarakat Kecamatan Ujung Pandang. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap tahap musyawarah berdasarkan data yang ada.

1. Rembuk Warga RT/RW, kegiatan ini merupakan forum awal di tingkat RT/RW yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggali potensi serta kebutuhan masyarakat. Dalam rembuk ini, warga menyampaikan usulan yang berkaitan dengan infrastruktur,

sosial, budaya, dan ekonomi. Hasil dari rembuk warga ini menjadi masukan penting untuk tahap berikutnya dalam perencanaan pembangunan.

2. Pramusrenbang, setelah rembuk warga dilanjutkan dengan Pramusrenbang yang berfungsi sebagai pintu gerbang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan ini memungkinkan warga untuk menyampaikan ide dan aspirasi mereka secara lebih terstruktur sebelum Musrenbang kelurahan dilaksanakan.
3. Musrenbang kelurahan, musyawarah tingkat kelurahan adalah forum resmi dimana prioritas kebutuhan masyarakat ditampung dan dirumuskan. Dalam musrenbang ini, hasil dari rembuk warga dan pramusrenbang dibahas secara mendalam untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana kelurahan. Hal ini memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
4. Musrenbang kecamatan, setelah musrenbang kelurahan hasilnya dibawa ke musrenbang tingkat kecamatan. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat. Di sini, usulan dari kelurahan dibahas dan disepakati sebagai rencana prioritas pembangunan di tingkat kecamatan.
5. Pengajuan Usulan OPD dan wali kota, setelah musrenbang kecamatan, usulan yang telah disepakati akan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan wali kota untuk mendapatkan dukungan dan alokasi dana yang diperlukan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
6. Tindak lanjut pelaksanaan program, setelah semua tahapan selesai, tindak lanjut pelaksanaan program menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat direalisasikan. Ini meliputi evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program serta refleksi untuk memperbaiki kekurangan di masa mendatang.

Melalui rangkaian kegiatan musyawarah ini, Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan komitmennya dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Dinas Pariwisata Kota Makassar (2023), pelaksanaan musyawarah dalam rentan waktu 6 bulan sudah terlaksana sebanyak 6 kali musyawarah. Dengan partisipasi yang tinggi dari warga, diharapkan hasil pelaksanaan program dapat lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

#### **3.1.4 Tanggapan atau Penolakan Terhadap Program**

Tanggapan atau penolakan terhadap program dalam partisipasi masyarakat pembangunan dan pengelolaan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap program tersebut. Menurut Yunus (2023) "Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan sangat penting untuk menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat." Masyarakat menyadari manfaat ekonomi dari pengembangan lorong wisata, seperti peningkatan penghasilan dan perbaikan lingkungan sekitar. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang bersikap apatis atau menolak program karena kurangnya pemahaman, keterbatasan dana, dan rendahnya keterampilan. Untuk mengatasi sikap penolakan ini, pemerintah dan tokoh masyarakat secara rutin melakukan pendekatan, sosialisasi, dan pembinaan sehingga secara bertahap sikap kontra

tersebut berkurang dan partisipasi masyarakat meningkat. Pendekatan ini berhasil merangkul warga yang sebelumnya menolak agar dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan dan pengelolaan lorong wisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa tanggapan dan penolakan masyarakat terhadap program *lorong* wisata merupakan hal penting dalam menentukan partisipasi mereka, keterlibatan masyarakat dalam memberikan feedback sangat berpengaruh pada keberhasilan program tersebut. tanggapan dari warga terhadap program yang diusulkan sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut relevan dan bermanfaat, Kecamatan Ujung Pandang menyadari pentingnya tanggapan masyarakat sebagai bagian dari partisipasi dalam program *lorong* wisata maka dari itu Kecamatan Ujung Pandang meningkatkan komunikasi dan menciptakan ruang bagi warga untuk berbicara agar partisipasi dari masyarakat signifikan dalam peningkatannya.

### 3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Nur Perdani (2024) yang berjudul Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani pada Program *Lorong* Wisata di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menunjukkan bahwa anggota kelompok wanita tani di Kelurahan Bara-Baraya aktif berpartisipasi dalam program lorong wisata, yang berdampak positif pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan Hal ini selaras dengan penelitian menurut Pambayun. (2021) "rendahnya kesadaran politik masyarakat menjadi tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi politik di daerah tersebut, sementara anggaran lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat" maka dari itu, partisipasi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program, mulai dari program yang melibatkan masyarakat hingga program politik. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Ujung Pandang menemukan partisipasi masyarakat yang cukup baik, terlihat dari promosi objek wisata melalui media sosial, keaktifan dalam sosialisasi, serta pemberian kritik dan masukan selama pengembangan lorong wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nurfauzi Iksan (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program *Lorong* Wisata di Kota Makassar, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program lorong wisata di Makassar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak positif pada kebersihan dan produktivitas lingkungan. Namun, rendahnya tingkat pendidikan warga mempengaruhi partisipasi, sehingga diperlukan sosialisasi lebih efektif. Menurut Pambayun (2020) "partisipasi generasi muda dalam program *Lorong* Literasi Gowa di Kecamatan Paccinongang berjalan cukup baik berkat sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas pemuda setempat. Meskipun terdapat kendala seperti kesibukan pemuda dan rendahnya kesadaran sebagian warga, keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil program tetap menunjukkan hasil yang positif." dengan tujuan yang sama mengenai memberdayakan lorong, maka dalam pelaksanaan programnya dibutuhkan partisipasi dan kontribusi aktif dari masyarakat. Pemerintah juga berupaya memperbaiki kondisi fisik lorong. Hal serupa ditemukan di Kecamatan Ujung Pandang, di mana rendahnya keterampilan masyarakat menghambat pemanfaatan lorong wisata untuk meningkatkan perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Amelia (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Program Lorong Wisata Di Kota Makassar*, menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif program lorong wisata di Makassar berjalan baik dengan kerjasama pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan, meski masih perlu perbaikan dalam kelembagaan, pengarsipan, dan komitmen bersama. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan keterbatasan dana dalam pembangunan sarana dan prasarana lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang yang mempengaruhi daya tarik wisata.

Penelitian Pratiwi Wulandari (2024) menunjukkan bahwa program lorong wisata di menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif program lorong wisata di Makassar berjalan baik dengan kerjasama pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan, meski masih perlu perbaikan dalam kelembagaan, pengarsipan, dan komitmen bersama. menemukan keterbatasan dana dalam pembangunan sarana dan prasarana lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang yang mempengaruhi daya tarik wisata. Kota Makassar merupakan strategi pemerintah untuk memulihkan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM.

Penelitian Mohammad Mukyadi (2017) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lorong di Kota Makassar diwujudkan melalui peningkatan kapasitas diri, pelatihan keterampilan, pembentukan badan usaha lorong, dan kemitraan dengan UKM. Masyarakat terlibat dalam pemeliharaan kebersihan, keamanan, kegiatan keagamaan, dan usaha ekonomi bersama. Namun, masih terdapat kendala seperti konflik antar lorong dan keterbatasan kemampuan dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan, sehingga kegiatan cenderung seremonial tanpa dampak nyata. Berbeda dengan penelitian Anda yang menyoroti kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam sosialisasi, musyawarah, serta pemberian kritik dan saran selama pengembangan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang, fokus Mukyadi lebih pada pemberdayaan kapasitas dan kemandirian lokal masyarakat lorong secara umum.

### **3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menyimpulkan bahwa membangun partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat dicapai dengan meyakinkan warga bahwa pembangunan yang direncanakan akan benar-benar terealisasi dan manfaatnya dapat segera dirasakan. Namun, untuk meningkatkan partisipasi yang diharapkan dalam proses perencanaan pembangunan, dibutuhkan upaya peningkatan keterampilan komunikasi yang efektif dan mudah dipahami oleh semua kelompok usia di masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, sangat penting untuk menciptakan sinergi yang kuat.

## **IV. KESIMPULAN**

1. Partisipasi masyarakat Kecamatan Ujung pandang dalam pembangunan dan pengelolaan *lorong* wisata di Kecamatan Ujung pandang Kota Makassar terlaksana secara aktif dan adanya dukungan langsung dari masyarakat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap program ini terutama pada saat pelaksanaan kegiatan musyawarah. Walaupun pada tahun ini terjadi penurunan aktivitas kegiatan *lorong* wisata, namun pelaksanaan program ini tetap termonitoring secara langsung oleh pemerintah setempat seperti kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan Teori Tingkat Partisipasi yang dikemukakan oleh (Cohen, J. And Uphoff, 1979) mengenai Partisipasi Masyarakat Terhadap pembangunan dan pengembangan lorong wisata

di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yaitu Partisipasi dalam Perencanaan, Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi dalam Evaluasi dan Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pengembangan lorong wisata baik dalam tahap perencanaan, pengelolaan maupun tahap pemanfaatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terkait pengembangan objek lorong wisata dapat dilihat dari kehadiran dan keaktifan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah serta keaktifan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran atau masukan selama kegiatan pengembangan objek wisata berlangsung. Partisipasi masyarakat dalam tahap pengelolaan terlihat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolalaannya, keikutsertaan mereka dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung dan keikutsertaan dalam mempromosikan obyek wisata. Manfaat partisipasi yang dirasakan masyarakat dalam pengembangan lorong wisata adalah penghasilan dari masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang menjadi meningkat, lingkungan dan objek lorong wisata menjadi lebih terawat dan wawasan masyarakat menjadi meningkat. Hal ini selaras dengan adanya aturan pelaksanaan partisipasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya, khususnya dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur serta membebani masyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, serta seminar, lokakarya, dan diskusi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mensosialisasikan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui media yang mudah diakses masyarakat serta mengembangkan sistem informasi penyusunan peraturan secara daring sesuai kondisi dan kesiapan daerah

2. Upaya yang diambil Kecamatan Ujung pandang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan *lorong* wisata di Kecamatan Ujung pandang Kota Makassar adalah dengan cara pendekatan langsung kepada masyarakat *lorong*, aspirasi masyarakat merupakan landasan dari program ini, maka pihak kecamatan dan kelurahan akan terus memfasilitasi ruang bicara untuk mengemukakan aspirasi yang dapat mendukung pelaksanaan program *lorong* wisata.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar saja sebagai model studi kasus yang di pilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan untuk Kecamatan Ujung Pandang memberikan bentuk dukungan berupa bantuan dana dan bantuan pengadaan alat atau fasilitas umum yang berhubungan dengan konsep pembangunan dan pengelolaan lorong wisata. Hal ini perlu untuk dilakukan karena nantinya dapat mencegah agar masyarakat tidak jenuh sehingga semangat dan partisipasi mereka dalam kegiatan lorong wisata dapat tetap terjaga.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Plt.Camat di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Lurah di Kecamatan Ujung Pandang dan Perwakilan Masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. 2016. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-3. <https://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477>.
- Achmad, Muchsin.2024. Partisipasi Publik sebagai Hak Konstitusional dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan. *Jurnal Konstitusi*. 21. 169-182.<https://doi.org/10.31078/jk2121>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. 1977. Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213-235. [https://www.researchgate.net/publication/222457017\\_Participation's\\_Place\\_in\\_Rural\\_Development\\_Seeking\\_Clarity\\_through\\_Specificity](https://www.researchgate.net/publication/222457017_Participation's_Place_in_Rural_Development_Seeking_Clarity_through_Specificity).
- Cahyani, R. A. P., & Sukmana, H. 2023. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Banjarejo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 6(3), 1080–1100. <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/issue/view/5>
- Efendi, S. S. 2022. *Partisipasi dan pemberdayaan di sektor publik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Ginting, G. 2024. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Kandui: Faktor pengaruh dan tantangan. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–123. <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/289>
- Hafrida, L., Hildawati, H., Sari, Y., Yanti, M., & Afrizal, D. 2023. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Dikelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1).5-6. : <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/320>
- Jeddawi, M. 2017. DISKRESI (FREIES ERMESSEN): Perangkat Hukum Penunjang Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 2(2), 1–11. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/927>
- Mukminto, Eko, Martitah Martitah, Ratih Damayanti, and Bayangsari Wedhatami. 2023. “Public Services Versus Covid-19: Participation of Villagers in Public Service Based on E Government in Pandemic”. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6 (1), 1-16. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.60650>.

- Putrawan, P. E., Made, D., & Ardana, J. 2019. Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *In Locus Majalah Ilmiah FISIP* vol. 11, 12-17. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/locus/article/view/18394>
- Pambayun, K. G., & Hapsari, R. D. 2020. Lorong Literasi Gowa Programs in Paccinongang Sub District. *Journal of Librarianship*, 1(1), 44–53. <https://ejournal.ipdn.ac.id/IJOLIB/article/view/1051>
- Pambayun, K. G., Pregiwati, R. A., & Hapsari, R. D. 2021. Literasi politik pada wilayah eks daerah tertinggal Indonesia: Studi kasus Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 14(2), 35-54. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/568>
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 12-15.
- Simon, Sumanjoyo. 2022. Buku ajar partisipasi dan pemberdayaan di sektor publik. In S. Hutagalung (Ed.), partisipasi dan pemberdayaan di sektor publik (1st ed., Issue Partisipasi). CV.Literasi Nusantara Abad.12-15.
- Safitri, N. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 304–314. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane>
- Sukrianto, A., & Mahendra, G. K. 2023. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. 4(4). 12-13. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1234>.
- Sahabuddin, Wasilah. 2024. Visual Communication Public Space Through Mural Art In Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*. 28 (1). <http://dx.doi.org/10.22441/sinergi.2024.1.009>
- Yunus, 2023. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains Universitas Tadulako*. 6 (5). 11-14. <https://doi.org/10.56338/jka.v6i10.4179>